

## ABSTRAK

Penerapan sektor non-migas (yaitu pajak), dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya wajib pajak yang tidak atau kurang membayar angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan, wajib pajak tidak menyetorkan angsuran atau tunggakan pajak tepat pada waktunya, serta tidak melaporkan jumlah pajak yang masih terhutang atau yang telah disetorkan dan lain sebagainya. Padahal Direktorat Jenderal Pajak telah cukup bijaksana menerapkan peraturan pemungutan pajak, berupa Prinsip Perhitungan Sendiri (*Self Assessment*).

Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kekuatan hukum ini dinyatakan dalam Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merevisi Undang-undang lama No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tatacara tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, penyanderaan, dan pelelangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis keadaan sebenarnya yang terdapat pada KPP Pratama Tasikmalaya serta menarik kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Pemahaman penerimaan pajak penghasilan badan diperoleh penulis dengan melakukan wawancara, mempelajari catatan dan dokumen, serta menggunakan alat bantu kuesioner yang diisi oleh bagian yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian penulis melakukan analisis dan evaluasi atas data dan jawaban kuesioner penerbitan surat paksa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah, penerbitan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan yang diterapkan sangat baik. Adanya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan setelah diterbitkannya Surat Paksa sehingga penerbitan surat paksa sangat berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	5
1.6 Metodologi Penelitian.....	9
1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Pajak.....	11
2.2 Pengertian Umum Pajak.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak.....	13
2.2.2 Fungsi Pajak.....	15
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	15

2.2.4	Dasar Pemungutan Pajak.....	16
2.2.5	Asas Pemungutan Pajak.....	17
2.2.6	Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.2.7	Tarif Pajak.....	19
2.3	Surat Paksa.....	21
2.3.1	Pengertian Surat Paksa.....	21
2.3.2	Isi dan Karakteristik Surat Paksa.....	22
2.3.3	Saat Penerbitan Surat Paksa.....	23
2.3.4	Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita.....	24
2.3.5	Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa.....	25
2.3.6	Penolakan terhadap Surat Paksa.....	27
2.3.7	Biaya Penyampaian Surat Paksa .....	28
2.3.8	Penentangan Terhadap Surat Paksa.....	28
2.3.9	Kekuatan Hukum Surat Paksa.....	28
2.4	Jurusita Pajak.....	30
2.4.1	Pengertian Jurusita Pajak.....	30
2.4.2	Tugas Jurusita Pajak.....	30
2.4.3	Tujuan Penyitaan.....	31
2.5	Penagihan Pajak.....	32
2.5.1	Pengertian Penagihan Pajak.....	32
2.5.2	Dasar Penagihan Pajak.....	33
2.5.3	Tindakan Penagihan Pajak.....	35
2.5.4	Daluwarsa Penagihan Pajak.....	36

2.6 Pajak Penghasilan Badan.....	36
2.6.1 Pajak Penghasilan.....	36
2.6.2 Subjek Pajak.....	37
2.6.3 Objek Pajak.....	38
2.6.4 Wajib Pajak.....	39
2.6.5 Cara Menghitung dan Melunasi Pajak.....	41
2.6.5.1 Cara Menghitung Pajak.....	41
2.6.5.2 Cara Melunasi Pajak.....	43

### **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1 Objek Penelitian.....	45
3.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Tasikmalaya .....	45
3.1.2 Gambaran Umum KPP Pratama Tasikmalaya.....	46
3.1.3 Penggabungan KPP, KPPBB, dan Karipka menjadi KPP Pratama Tasikmalaya.....	48
3.1.4 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Tasikmalaya.....	49
3.1.5 Struktur Organisasi.....	50
3.1.6 Pelaksanaan Surat Paksa.....	54
3.1.6.1 Tindakan Penagihan Pajak.....	54
3.1.6.2 Pengeluaran Surat Teguran.....	55
3.1.6.3 Pengeluaran Surat Paksa.....	56
3.1.6.4 Pengeluaran Surat Perintah Melakukan Sita.....	60
3.1.6.5 Pengeluaran Surat Pencabutan Sita.....	62

3.1.6.6	Pengeluaran Permintaan Jadwal Waktu&Tempat Pelelangan.....	63
3.1.6.7	Pengeluaran Surat Pemberitahuan akan dilakukan Pelelangan atau Kesempatan Terakhir.....	64
3.1.6.8	Pengeluaran Lelang.....	64
3.2	Metode Penelitian.....	66
3.2.1	Operasionalisasi Variabel.....	66
3.2.2	Tehnik Pengumpulan Data.....	69
3.2.3	Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	70

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Analisis Data Hasil Penelitian.....	72
4.1.1	Pelaksanaan Surat Paksa.....	72
4.1.1.1	Analisis Tindakan Penagihan Pajak.....	72
4.1.1.1.1	Analisis Pengeluaran Surat Teguran.....	73
4.1.1.1.2	Analisis Pengeluaran Surat Paksa.....	73
4.1.1.1.3	Analisis Pengeluaran Surat Perintah Melakukan Penyitaan.....	75
4.1.1.1.4	Analisis Pengeluaran Surat Pencabutan Sita..	76
4.1.1.1.5	Analisis Pengeluaran Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.....	77

4.1.1.1.6	Analisis Pengeluaran Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Pelelangan / Kesempatan Terakhir.....	77
4.1.1.1.7	Analisis Pengeluaran Lelang.....	78
4.2	Pembahasan.....	84
4.2.1	Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase Jawaban ....	79
4.2.2	Analisis Penerbitan Surat Paksa dalam Kantor Pelayanan Pajak .....	80
4.2.3	Kegiatan Pajak Penghasilan Badan dalam Kantor Pelayanan Pajak .....	81
4.2.4	Analisis Penerbitan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.....	81
4.3	Pengujian Hipotesis.....	84
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	87
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>xiv</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Karakteristik Untuk Setiap Jenis KPP.....	47
Tabel 3.2	Penetapan Indikator Variabel Independen dan Dependen.....	68
Tabel 4.1	Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase Jawaban.....	79
Tabel 4.2	Jumlah Jawaban Responden atas Penerbitan Surat Paksa.....	80
Tabel 4.3	Jumlah Jawaban Responden atas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	81
Tabel 4.4	Jumlah Jawaban Responden atas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.....	83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Berita Acara Bimbingan
2. Surat Keterangan Survei dari KPP Pratama Tasikmalaya
3. Struktur Organisasi KPP Pratama Tasikmalaya
4. Contoh Surat Himbuan
5. Surat Teguran
6. Contoh Surat Paksa
7. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
8. Berita Acara Pelaksanaan Sita
9. Stiker Penyitaan
10. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita
11. Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan
12. Kuesioner Penelitian

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Tasikmalaya.....	83
---	----